

## Peran Etika Media dalam Mencegah Penyebaran Fitnah di Era Digital: Tantangan dan Solusi

### *The Role of Media Ethics in Preventing the Spread of Defamation in the Digital Era: Challenges and Solutions*

**Ridwan**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: [ridwanibnhambali@stiba.ac.id](mailto:ridwanibnhambali@stiba.ac.id)

**Kamaluddin Tajibu**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: [kamaluddin.tajibu@uin-alauddin.ac.id](mailto:kamaluddin.tajibu@uin-alauddin.ac.id)

#### Article Info

Received : 13 January 2025  
Revised : 14 January 2025  
Accepted : 16 January 2025  
Published : 1 February 2025

**Keywords:** *defamation, media ethics, media literacy, journalistic responsibility*

**Kata kunci:** *fitnah, etika media, literasi media, tanggung jawab jurnalistik*

#### Abstract

*In the digital information era, media plays a vital role in disseminating news and shaping public opinion. However, it also faces significant challenges, particularly in the spread of defamation, which can harm the reputation of individuals, groups, or institutions. This study aims to analyze media ethics principles in avoiding defamation, including information verification, independence, fairness, and caution, while identifying contributing factors such as lack of journalistic professionalism, influence of vested interests, and the role of social media. Using a qualitative descriptive-analytical approach, the research explores strategic measures to prevent defamation, such as journalistic ethics training, internal supervision, strict regulations, and enhancing media literacy. This study aspires to contribute to more responsible reporting, promote media integrity, and foster a critical and informed society.*

#### Abstrak

Dalam era informasi digital, media memiliki peran penting sebagai sarana penyebaran berita dan pembentukan opini publik. Namun, media juga menghadapi tantangan serius berupa penyebaran fitnah yang dapat merusak reputasi individu, kelompok, atau institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip etika media dalam menghindari fitnah, termasuk verifikasi informasi, independensi, keadilan, dan kehati-hatian, serta mengidentifikasi faktor penyebab fitnah seperti kurangnya profesionalisme jurnalis, pengaruh kepentingan tertentu, dan peran media sosial. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengeksplorasi langkah-langkah strategis untuk mencegah fitnah, seperti pelatihan etika jurnalistik, pengawasan internal, regulasi tegas, dan peningkatan literasi media masyarakat. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada

pemberitaan yang lebih bertanggung jawab, mendorong integritas media, dan menciptakan masyarakat yang kritis serta sadar informasi.

---

**How to cite:** Ridwan, Kamaluddin Tajibu. "Peran Etika Media dalam Mencegah Penyebaran Fitnah di Era Digital: Tantangan dan Solusi", *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (2025): 137-153. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

---

**Copyright:** @2025, Ridwan, Kamaluddin Tajibu

---



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era informasi yang semakin maju, media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Media menjadi sarana utama untuk mendistribusikan informasi dengan cepat dan luas, menjadikannya salah satu pilar utama dalam pembentukan opini publik<sup>1</sup>. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait dengan penyebaran fitnah yang dapat merusak reputasi individu, kelompok, maupun institusi<sup>2</sup>. Fitnah, yang sering kali berawal dari pemberitaan yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi, memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara sosial, politik, maupun moral.

Dalam konteks sosial, fitnah dapat memecah belah hubungan antarindividu dan kelompok, menciptakan ketegangan, bahkan konflik yang berkepanjangan. Ketika informasi yang salah atau manipulatif tersebar, kepercayaan antarindividu atau kelompok dapat runtuh<sup>3</sup>. Misalnya, fitnah yang menargetkan kelompok tertentu sering kali memperburuk stereotip negatif dan memperkuat prasangka yang sudah ada, sehingga memicu diskriminasi dan permusuhan. Ketegangan yang dihasilkan dari fitnah ini dapat berkembang menjadi konflik yang melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, harmoni sosial yang telah terbangun dengan susah payah dapat hancur dalam waktu singkat.

Secara politik, fitnah sering kali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan atau mengacaukan stabilitas politik suatu negara<sup>4</sup>. Dalam dunia politik, penyebaran informasi palsu yang dirancang untuk mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok politik tertentu dapat memengaruhi opini publik secara signifikan. Strategi ini sering digunakan dalam kampanye politik untuk menjatuhkan lawan atau menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Dampaknya tidak hanya merusak reputasi individu yang menjadi

---

<sup>1</sup> Khoirun Nisa, "Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial," *Impressive: Journal of Education* 2, no. 1 (2024): 1-11.

<sup>2</sup> Deby Amaliah, Siti Zainab, and Favi Aditia Ikhsan, "Analisis Konten Hoaks Dan Tabayyun Dalam Akun Media Sosial Tiktok@ Basyasman00," *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 63-73.

<sup>3</sup> Israwati Suryadi, "Peran Media Massa Dalam Membentuk Realitas Sosial," *Jurnal Academica Fisip Untad* 3, no. 2 (2011): 634-46.

<sup>4</sup> Maghrifa Kafka Razaqa Kafka et al., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 2 (2022): 132-41.

target, tetapi juga dapat mengganggu proses demokrasi dan stabilitas politik secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemimpin atau institusi, hal ini dapat menciptakan kekacauan yang sulit untuk diperbaiki.

Dampak moral juga tidak kalah serius, di mana penyebaran fitnah dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media, merusak integritas jurnalistik, dan menciptakan budaya informasi yang tidak sehat. Ketika media, sebagai salah satu pilar demokrasi, terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulatif, kepercayaan masyarakat terhadap media akan menurun<sup>5</sup>. Hal ini tidak hanya merugikan media itu sendiri, tetapi juga merusak fungsi utama media sebagai penyampai kebenaran. Selain itu, budaya informasi yang didominasi oleh fitnah dan berita palsu akan menciptakan masyarakat yang cenderung skeptis dan sulit percaya pada informasi yang valid. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan masyarakat yang cerdas informasi dan berintegritas.

Dalam menghadapi tantangan ini, prinsip dan etika media menjadi elemen yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemberitaan yang disampaikan kepada publik tidak hanya informatif tetapi juga bertanggung jawab. Etika media berfungsi sebagai panduan bagi para jurnalis dan pelaku media dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan transparansi<sup>6</sup>. Penerapan prinsip-prinsip etika media tidak hanya membantu mencegah penyebaran fitnah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap media sebagai sumber informasi yang kredibel<sup>7</sup>.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika media masih sering terjadi. Meskipun berbagai prinsip etika dan regulasi sudah ditetapkan, banyak media yang terjebak dalam persaingan untuk memberikan informasi tercepat, seringkali tanpa memeriksa kebenaran fakta terlebih dahulu. Tekanan untuk segera mempublikasikan berita, terutama dalam situasi sensitif atau kontroversial, membuat media sering kali mengabaikan proses verifikasi yang seharusnya menjadi langkah utama dalam pemberitaan. Selain itu, motif tertentu, seperti kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi, seringkali menjadi pendorong bagi media untuk menyajikan berita dengan cara yang memihak atau manipulatif, yang pada akhirnya dapat menciptakan fitnah. Pengaruh media sosial yang berkembang pesat juga memperburuk situasi, di mana berita palsu dan hoaks dapat menyebar dengan cepat tanpa adanya filter yang memadai. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi media tradisional dalam menjaga integritas dan kredibilitasnya.

---

<sup>5</sup> Hema Junaice Sitorus and Mellysa Tanoyo, "Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 4, no. 2 (2024): 383-94.

<sup>6</sup> Unika Putry Mutiarani, Iztiyaul Nur Karimah, and Yudistira Phrygian Syarafa, "Etika Komunikasi Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 2 (2024): 204-15.

<sup>7</sup> Abdul Dahlan Choliq, "Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa," *Jurnal Hukum Unissula* 25, no. 1 (2011): 12279.

Penting untuk dicatat bahwa pembahasan mengenai etika media dan upaya mencegah fitnah sangat relevan di tengah era digital yang semakin berkembang pesat. Informasi kini dapat menyebar dengan cepat melalui berbagai platform, dan dampaknya bisa sangat luas, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Penyebaran fitnah tidak hanya merusak reputasi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial, memperburuk polarisasi, dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan kolektif dari media, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Melalui peningkatan literasi media dan penerapan prinsip etika yang ketat, kita dapat memastikan bahwa informasi yang diterima oleh publik adalah akurat, adil, dan bertanggung jawab, serta mencegah dampak negatif dari penyebaran fitnah.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, makalah ini akan membahas beberapa pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah:

1. Bagaimana prinsip etika media untuk menghindari fitnah dalam pemberitaan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fitnah dalam media dan bagaimana pencegahannya?

Dalam rumusan masalah pertama, makalah ini membahas tentang bagaimana prinsip etika media menjadi pedoman yang harus diikuti oleh jurnalis dan institusi media untuk memastikan bahwa pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat bersifat informatif, akurat, dan tidak merugikan pihak tertentu. Untuk menghindari fitnah dalam pemberitaan, prinsip-prinsip seperti verifikasi informasi, independensi, keadilan, dan kehati-hatian menjadi kunci utama. Verifikasi informasi bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan setiap berita sebelum dipublikasikan, sehingga risiko penyebaran informasi yang salah dapat diminimalkan. Selain itu, independensi media memastikan bahwa pemberitaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, baik politik, ekonomi, maupun pribadi, yang dapat memicu manipulasi informasi. Keadilan dalam pemberitaan mengharuskan media untuk menyampaikan berita secara seimbang, tanpa bias atau keberpihakan, sementara kehati-hatian dalam memilih sumber dan bahasa pemberitaan membantu menghindari kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat menjadi tameng yang efektif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif fitnah dalam pemberitaan.

Sedangkan dalam rumusan masalah kedua, penulis berfokus pada pembahasan tentang terjadinya fitnah dalam media yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari sisi internal media maupun eksternal. Dari sisi internal, kurangnya profesionalisme jurnalis menjadi salah satu penyebab utama. Ketika jurnalis tidak melakukan verifikasi yang memadai atau terpengaruh oleh tekanan waktu untuk mengejar kecepatan publikasi, risiko penyebaran informasi yang salah meningkat. Selain itu, adanya bias atau

keberpihakan jurnalis terhadap pihak tertentu dapat mengaburkan objektivitas dalam pemberitaan. Dari sisi eksternal, tekanan dari pihak berkepentingan, seperti pengiklan, pemerintah, atau kelompok tertentu, dapat memengaruhi independensi media. Misalnya, pemberitaan yang sengaja dimanipulasi untuk mendukung agenda politik tertentu atau untuk menyerang lawan menjadi salah satu bentuk fitnah yang sering terjadi. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyebaran fitnah. Dengan adanya media sosial, informasi dapat tersebar dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga memperbesar peluang terjadinya kesalahpahaman atau manipulasi.

Untuk mencegah terjadinya fitnah dalam media, langkah-langkah strategis perlu diambil. Dari sisi internal, institusi media harus meningkatkan profesionalisme jurnalis melalui pelatihan berkelanjutan tentang etika jurnalistik dan teknik verifikasi informasi. Pengawasan internal yang ketat juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pemberitaan telah memenuhi standar etika. Dari sisi eksternal, regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah terhadap penyebaran informasi palsu dapat membantu mengurangi penyebaran fitnah. Selain itu, literasi media di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan agar publik dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima, terutama dari media sosial. Dengan kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat, dampak negatif fitnah dalam pemberitaan dapat diminimalkan secara signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika media yang menjadi pedoman penting dalam pemberitaan, khususnya dalam menghindari terjadinya fitnah. Fokus utama adalah pada penerapan prinsip seperti verifikasi informasi, independensi, keadilan, dan kehati-hatian, yang bertujuan memastikan pemberitaan yang akurat, seimbang, dan tidak merugikan pihak tertentu. Prinsip-prinsip ini dipandang sebagai fondasi dalam menjaga integritas media dan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran informasi yang salah.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya fitnah dalam media, baik dari sisi internal seperti kurangnya profesionalisme jurnalis dan tekanan untuk mengejar kecepatan publikasi, maupun dari sisi eksternal seperti pengaruh pihak berkepentingan dan perkembangan teknologi digital. Dalam upaya pencegahan, penelitian ini menggali langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan, termasuk meningkatkan profesionalisme jurnalis melalui pelatihan, menerapkan pengawasan internal yang ketat, memperkuat regulasi pemerintah terhadap penyebaran informasi palsu, serta meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat.

Dengan memahami dan mengatasi berbagai tantangan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pemberitaan media yang lebih bertanggung jawab dan membantu membangun masyarakat yang lebih kritis dan sadar terhadap informasi yang diterima.



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Islam terhadap pengucapan salam kepada penganut agama lain, serta dampaknya terhadap dakwah Islam. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan dengan norma-norma agama dan sosial yang perlu dianalisis secara komprehensif, terutama dalam konteks masyarakat yang pluralistik.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Prinsip Etika Media untuk Menghindari Fitnah dalam Pemberitaan

#### 1. Definisi Fitnah dalam Perspektif Media

Fitnah dalam konteks jurnalistik merujuk pada penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan, yang berpotensi merusak reputasi individu, kelompok, atau institusi. Informasi yang disebarkan tanpa dasar fakta yang jelas atau bukti yang valid dapat dikategorikan sebagai fitnah, dan dalam hukum, tindakan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>8</sup>. Di Indonesia, misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310-311 mengatur tentang tindak pidana fitnah yang dapat merugikan nama baik seseorang.

Dengan pesatnya perkembangan media digital, fitnah kini bisa menyebar lebih cepat melalui berita yang tidak terverifikasi atau disajikan dengan cara manipulatif, baik di media arus utama maupun media sosial<sup>9</sup>. Hal ini menambah kompleksitas permasalahan, karena informasi yang salah atau tidak lengkap dapat dengan mudah viral, memperburuk dampak sosial akibat penyebaran informasi yang tidak terkendali. Media, sebagai penyebar informasi utama, harus menyadari bahwa berita yang salah dapat merusak kehidupan sosial dan pribadi banyak orang<sup>10</sup>.

Contoh kasus fitnah dalam pemberitaan, ketika salah satu media online menyebarkan berita palsu yang mengaitkan seorang pejabat pemerintah dengan kasus korupsi tanpa adanya bukti yang konkret. Berita tersebut menyebabkan pejabat tersebut mengalami tekanan sosial yang luar biasa dan kehilangan reputasinya, meskipun akhirnya terbukti tidak bersalah. Di media sosial, kasus serupa juga terjadi, misalnya pada penyebaran video yang telah diedit untuk menjelekkan seorang tokoh masyarakat. Walaupun video tersebut akhirnya terbukti palsu, dampaknya sudah sangat luas, menyebabkan perpecahan di masyarakat dan merusak reputasi individu yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Muhammad Aminullah, "Etika Jurnalisme Dan Pembentukan Masyarakat Sadar Informasi," *Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika Dan Bisnis Dalam Jurnalisme* 63 (2021).

<sup>9</sup> Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik: Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam* (Pustaka Al-Kautsar, 2009).

<sup>10</sup> Hidayat Surya Abadi, "Media Sosial Dan Antitesis Jurnalisme," *Jurnal Spektrum Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 17-29.

## 2. Prinsip Etika Media

Prinsip dasar etika jurnalistik yang mencakup akurasi, keadilan, dan tanggung jawab merupakan landasan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas media. *Pertama*, akurasi, sebagai salah satu prinsip utama dalam etika jurnalistik, menuntut media untuk memberikan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan publik<sup>11</sup>. Dalam konteks ini, akurasi berarti bahwa setiap berita yang disajikan harus didasarkan pada fakta yang telah melalui proses verifikasi yang cermat dan teliti. Proses verifikasi ini melibatkan pengecekan terhadap sumber informasi, baik melalui konfirmasi langsung dengan narasumber yang relevan, maupun dengan memanfaatkan sumber-sumber lain yang kredibel untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak mengandung kesalahan atau manipulasi.

Dalam Islam, akurasi dalam penyampaian informasi sangat ditekankan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Hujurat (49:6),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِبَهْلَلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk tidak sembarangan menerima dan menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya. Dalam konteks media, hal ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan pengecekan yang teliti terhadap setiap informasi yang diterima, guna menghindari penyebaran berita palsu atau fitnah yang dapat merugikan orang lain.

Akurasi dalam Islam tidak hanya mencakup kebenaran faktual, tetapi juga mencakup kebenaran dalam niat dan tujuan. Dalam Surah al-Baqarah (2:42), Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, padahal kamu mengetahui." Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam menyampaikan informasi, dengan tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebohongan atau manipulasi. Media, sebagai saluran informasi, harus menghindari memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut dapat menyesatkan publik dan merusak kepercayaan terhadap media itu sendiri.

Selain itu, dalam perspektif Islam, penyampaian informasi yang akurat juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang besar. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan kita. Oleh karena itu, media harus memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan

---

<sup>11</sup> Christiany Juditha, "Akurasi Berita Dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi Di Portal Berita Detiknews)," *Jurnal Pekommas* 16, no. 3 (2013): 145–54.

kepada publik telah diverifikasi dan dipastikan kebenarannya, agar tidak menimbulkan fitnah atau kebingungan di kalangan masyarakat.

Kesalahan informasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu, kelompok, atau bahkan negara. Sebagai contoh, pemberitaan yang tidak akurat tentang seorang individu atau lembaga dapat merusak reputasi mereka secara permanen, bahkan jika kesalahan tersebut akhirnya diperbaiki. Ini bukan hanya merugikan pihak yang diberitakan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media tersebut. Kepercayaan ini, begitu rusak, sangat sulit untuk dipulihkan. Oleh karena itu, media memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah diverifikasi dengan baik, sehingga tidak ada kerugian yang timbul akibat kesalahan informasi<sup>12</sup>.

Lebih jauh lagi, akurasi bukan hanya soal fakta yang benar, tetapi juga soal konteks. Informasi yang benar pun bisa disalahartikan jika disajikan tanpa memberikan gambaran yang lengkap atau tanpa mempertimbangkan perspektif yang relevan. Media harus dapat menyajikan informasi secara menyeluruh, memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami berita dengan tepat, serta memastikan bahwa informasi tidak diambil keluar dari konteks yang dapat memanipulasi maknanya. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana berita dapat tersebar luas dalam hitungan detik, menjaga akurasi dalam pemberitaan adalah tantangan besar, namun merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap media untuk menjaga integritasnya dan mencegah penyebaran fitnah.

**Kedua**, keadilan menjadi prinsip kedua yang sangat penting. Dalam etika jurnalistik, pemberitaan harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa keberpihakan<sup>13</sup>. Dalam konteks ini, keadilan berarti bahwa media harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah isu atau peristiwa untuk menyampaikan pandangan mereka. Tidak ada pihak yang boleh didiskriminasi atau diabaikan hanya karena latar belakang, kekuasaan, atau pengaruh tertentu. Keadilan dalam pemberitaan juga berarti bahwa media harus menyajikan informasi dengan cara yang seimbang, tanpa condong kepada salah satu pihak, serta menghindari stereotip atau diskriminasi yang bisa memperburuk ketegangan sosial.

Dalam Islam, prinsip keadilan ini sangat ditekankan, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun dalam interaksi antar sesama. Allah Swt. dalam Al-Qur'an berfirman dalam Surah al-Ma'idah (5:8),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

<sup>12</sup> Hijriani Hijriani and Muhammad Nadzirin Anshari Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 301–14.

<sup>13</sup> Heri Romli Pasrah, "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dakwah* Vol IX, No 2, Juli-Desember 2008, 2008.



Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, bahkan ketika itu menyangkut kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam konteks media, hal ini berarti bahwa jurnalis harus menegakkan keadilan dengan memberikan ruang bagi setiap pihak yang terkait untuk berbicara dan memberikan pandangan mereka, sehingga informasi yang disampaikan tidak berat sebelah atau memihak pada satu pihak saja.

Keadilan dalam pemberitaan juga mengandung makna bahwa media tidak boleh menonjolkan satu perspektif atau opini saja, terutama dalam isu-isu yang kompleks dan multi-perspektif. Dalam prakteknya, ini berarti media harus berusaha untuk menggali berbagai sumber informasi, mendengarkan suara dari semua pihak yang terlibat, dan menghindari pemberitaan yang cenderung menghakimi atau menciptakan kesan negatif terhadap satu pihak tertentu tanpa dasar yang jelas. Misalnya, dalam kasus peristiwa sosial atau politik yang melibatkan berbagai kelompok, media harus memberikan ruang bagi semua kelompok untuk mengungkapkan pendapat mereka, tanpa memihak atau mengurangi nilai dari pandangan yang satu dengan pandangan yang lain.

Islam juga mengajarkan untuk selalu bersikap adil dalam setiap tindakan, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Nisa (4:58), yang artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil..." Dalam konteks media, ini mengingatkan jurnalis untuk menjaga objektivitas dalam pemberitaan, tidak membiarkan kepentingan pribadi, ideologi, atau tekanan eksternal memengaruhi cara mereka menyajikan informasi. Keberpihakan atau bias yang tidak adil dapat merusak kredibilitas media, serta memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi media itu sendiri.

Selain itu, keadilan dalam pemberitaan juga berarti melibatkan prinsip tanggung jawab, yaitu bahwa setiap informasi yang disebarkan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan pihak yang diberitakan. Media yang adil tidak hanya menyajikan fakta secara berimbang, tetapi juga mempertimbangkan kontekstualisasi informasi untuk mencegah penyalahgunaan yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu<sup>14</sup>.

Secara keseluruhan, prinsip keadilan dalam jurnalistik, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, adalah untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu isu mendapatkan hak yang setara untuk

---

<sup>14</sup> Hijriani and Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif."

diwakili dan didengarkan suaranya. Dengan menegakkan keadilan dalam pemberitaan, media dapat berperan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan harmonis, serta menghindari penyebaran fitnah yang dapat merusak hubungan sosial.

*Ketiga*, tanggung jawab, adalah prinsip etika jurnalistik yang sangat fundamental, yang mengharuskan media untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam setiap pemberitaan<sup>15</sup>. Media tidak hanya bertugas untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang lebih besar terhadap masyarakat. Media harus menyadari bahwa informasi yang mereka sampaikan memiliki dampak yang luas dan bisa mempengaruhi opini publik, membentuk persepsi, dan bahkan memicu tindakan atau reaksi sosial. Oleh karena itu, media harus memastikan bahwa pemberitaan mereka tidak hanya akurat, tetapi juga tidak memicu konflik sosial, menambah ketegangan, atau menyebarkan fitnah yang bisa merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Islam, tanggung jawab merupakan konsep yang sangat ditekankan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Isra (17:36),

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”

Ayat ini mengingatkan kita untuk bertindak dengan hati-hati dalam menyampaikan informasi dan memastikan bahwa setiap tindakan kita didasarkan pada pengetahuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks media, hal ini berarti bahwa jurnalis dan lembaga media harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi, memastikan bahwa mereka hanya menyebarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari informasi yang tidak jelas atau tidak diverifikasi yang bisa menyesatkan publik.

Tanggung jawab media juga berarti bahwa media harus mengedepankan kepentingan umum dan menghindari pemberitaan yang hanya bertujuan untuk kepentingan sensasional atau meraih keuntungan finansial, seperti dalam kasus berita hoaks atau informasi yang dibuat untuk menimbulkan kegemparan. Media harus memastikan bahwa pemberitaan mereka tidak memperburuk keadaan atau memperparah masalah yang sedang terjadi. Sebagai contoh, dalam situasi konflik sosial atau politik, media memiliki peran yang sangat penting dalam menenangkan situasi dan memberikan perspektif yang seimbang, bukan malah memperburuk ketegangan dengan menyebarkan informasi yang provokatif atau berpotensi menambah perpecahan.

---

<sup>15</sup> Lailatul Maflucha, S Ikom Qoni'ah Nur Wijayanti, and M Ikom, “Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).

Islam juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Dalam Surah al-Hujurat (49:6), Allah Swt. berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa sengaja, karena kamu tidak tahu." Ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak sembarangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Dalam konteks media, tanggung jawab ini mengingatkan jurnalis untuk selalu melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap setiap informasi sebelum dipublikasikan, untuk memastikan bahwa berita yang disebar tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pihak manapun.

Tanggung jawab media juga terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak individu. Media harus berhati-hati dalam memberitakan informasi yang menyangkut privasi individu, terutama dalam kasus yang sensitif seperti isu keluarga, kesehatan, atau kejahatan. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan privasi orang lain adalah hal yang sangat dihargai. Dalam Surah Al-Hujurat (49:11), Allah Swt. mengingatkan kita untuk tidak mengolok-olok atau merendahkan orang lain, yang merupakan bagian dari menjaga martabat dan hak-hak pribadi seseorang.

Sebagai media yang bertanggung jawab, tidak hanya perlu menjaga akurasi dan keadilan, tetapi juga harus menjaga keharmonisan sosial dan mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari pemberitaan yang tidak tepat. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial media sangat besar, karena mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, media harus menjaga integritas dan profesionalisme mereka, memastikan bahwa mereka bertindak sebagai agen perubahan yang positif dan tidak terjebak dalam pemberitaan yang bisa merusak tatanan sosial.

Secara keseluruhan, prinsip tanggung jawab dalam etika jurnalistik, sebagaimana diajarkan dalam Islam, adalah untuk memastikan bahwa setiap pemberitaan dilakukan dengan kesadaran penuh akan dampaknya terhadap masyarakat. Media harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya akurat dan adil, tetapi juga dapat memperkuat integritas sosial, menjaga keharmonisan, dan menghindari penyebaran fitnah atau informasi yang dapat merusak kehidupan sosial. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, media dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih bijaksana dan harmoni, yang pada gilirannya dapat memperkuat fondasi moral dan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai kode etik jurnalistik, baik yang bersifat nasional maupun internasional, menjadi landasan bagi media untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Di Indonesia, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengatur kewajiban wartawan untuk menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak berniat buruk. Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 19, menggarisbawahi kebebasan berpendapat yang harus diimbangi dengan

tanggung jawab untuk menghormati hak dan reputasi orang lain. Kode Etik Internasional yang diterbitkan oleh *International Federation of Journalists* (IFJ) juga menekankan pentingnya kebenaran dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap pemberitaan<sup>16</sup>.

### 3. Implementasi Prinsip Etika untuk Menghindari Fitnah

Untuk menghindari fitnah dalam pemberitaan, media harus menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik dengan tegas. Salah satunya adalah melalui proses verifikasi dan konfirmasi informasi sebelum dipublikasikan. Setiap informasi yang diterima harus diperiksa keakuratannya melalui sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Jurnalis harus memastikan bahwa narasumber yang digunakan memiliki otoritas dan kompetensi dalam isu yang diberitakan. Untuk menghindari bias atau kesalahan informasi, sangat disarankan untuk melakukan cross-check dengan beberapa sumber independen.

Selain itu, media harus menghindari penggunaan judul atau narasi yang provokatif dan spekulatif. Judul berita harus mencerminkan isi secara faktual dan tidak menambah elemen yang bisa memancing emosi atau kesalahpahaman pembaca. Penggunaan kata-kata hiperbolis, ambigu, atau sensasional yang dapat mengarahkan pembaca pada kesimpulan yang salah harus dihindari, karena ini bisa memicu persepsi yang keliru dan memperburuk situasi.

Terakhir, media juga harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi individu dalam pemberitaan. Dalam kasus-kasus yang sensitif, seperti isu kesehatan, keluarga, atau tragedi pribadi, media wajib menghormati privasi individu yang terlibat. Informasi pribadi seseorang tidak boleh dipublikasikan tanpa izin, kecuali jika memiliki kepentingan publik yang jelas dan sah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik tersebut, media dapat memainkan peranannya secara profesional dan bertanggung jawab. Ini juga akan membantu meminimalkan risiko terjadinya fitnah dalam pemberitaan, serta menjaga integritas media sebagai saluran informasi yang kredibel dan dapat dipercaya oleh publik.

## B. Penyebab Terjadinya Fitnah dalam Media dan Pencegahannya

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Fitnah

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya fitnah dalam media adalah kurangnya verifikasi informasi. Dalam dunia jurnalistik yang serba cepat, ada tekanan besar untuk segera memberitakan sebuah peristiwa, yang seringkali mengorbankan proses pengecekan fakta. Media yang terburu-buru untuk merilis berita tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu berisiko besar untuk menyebarkan informasi yang salah, yang kemudian dapat berkembang menjadi fitnah. Proses verifikasi yang seharusnya dilakukan untuk

---

<sup>16</sup> Shinta Bela Dewanti, "Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Kej) Dalam Kegiatan Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Harian Joglosemar)," 2014.

memastikan kebenaran suatu informasi seringkali diabaikan karena keinginan untuk segera mengunggah berita atau menarik perhatian pembaca<sup>17</sup>.

Selain itu, pengaruh kepentingan ekonomi atau politik juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya fitnah dalam pemberitaan. Dalam beberapa kasus, media atau individu yang terlibat dalam penyebaran informasi tidak jarang melakukan manipulasi berita untuk tujuan tertentu, seperti memperoleh keuntungan ekonomi atau mendukung agenda politik tertentu. Berita yang dimanipulasi ini sering kali dirancang untuk menggiring opini publik atau merusak reputasi lawan politik, yang pada akhirnya menciptakan fitnah yang merugikan banyak pihak.

Faktor lainnya adalah ketidakpahaman terhadap hukum dan etika jurnalistik. Minimnya edukasi atau pelatihan yang memadai mengenai etika jurnalistik dapat menyebabkan wartawan atau jurnalis kurang memahami tanggung jawab mereka dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai etika dan hukum yang berlaku, seseorang bisa saja tanpa sadar terlibat dalam penyebaran fitnah<sup>18</sup>. Dalam hal ini, kurangnya pengetahuan tentang batasan-batasan yang ada dalam hukum juga bisa memicu terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu dan kelompok yang diberitakan.

Di era digital, pengaruh media sosial dan berita hoaks juga sangat besar dalam memicu terjadinya fitnah. Informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga dapat dengan mudah tersebar tanpa kontrol. Berita hoaks yang tidak terdeteksi dan tersebar dengan cepat dapat menimbulkan kebingungan dan konflik sosial. Berita palsu yang disebar di platform digital ini berpotensi menjadi fitnah, merusak reputasi individu atau kelompok, dan memengaruhi opini publik secara luas<sup>19</sup>.

## 2. Strategi Pencegahan Fitnah dalam Media

Untuk mencegah terjadinya fitnah dalam pemberitaan, diperlukan berbagai strategi yang melibatkan semua pihak, baik media, jurnalis, hingga masyarakat. Salah satu langkah penting adalah melalui edukasi dan pelatihan jurnalistik. Peningkatan kompetensi wartawan dalam hal etika jurnalistik dan pemahaman tentang hukum yang berlaku sangat penting untuk mengurangi risiko penyebaran fitnah. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan dalam verifikasi informasi, pemahaman terhadap prinsip dasar jurnalistik, serta tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh media dalam menyampaikan berita kepada publik.

Selain itu, penerapan teknologi verifikasi fakta juga merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mencegah fitnah. Di tengah maraknya berita palsu

---

<sup>17</sup> Hijriani and Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif."

<sup>18</sup> Nisa, "Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial."

<sup>19</sup> Ibid.



dan hoaks, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memeriksa keaslian informasi yang beredar. Beberapa tools atau aplikasi untuk memverifikasi fakta kini tersedia dan dapat digunakan oleh wartawan untuk memastikan bahwa berita yang disajikan adalah sah dan tidak mengandung unsur fitnah. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam mengurangi kesalahan informasi yang bisa berujung pada penyebaran fitnah.

Pengawasan dan regulasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan fitnah. Dewan Pers dan badan pengawas media lainnya harus menjalankan tugas mereka untuk memastikan bahwa media yang beroperasi mematuhi kode etik jurnalistik dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif dapat mengurangi potensi terjadinya fitnah, serta memberikan sanksi bagi media yang melanggar aturan yang ada.

Terakhir, meningkatkan literasi media untuk publik juga merupakan langkah penting dalam pencegahan fitnah. Edukasi kepada masyarakat mengenai cara membedakan berita yang kredibel dan hoaks harus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat yang lebih teredukasi mengenai cara membaca berita dengan kritis dan bijaksana akan lebih mampu menyaring informasi yang mereka terima, serta tidak mudah terjebak dalam penyebaran fitnah. Dengan meningkatkan literasi media, publik akan lebih sadar akan pentingnya verifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya lebih lanjut.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, baik oleh media, jurnalis, maupun masyarakat, penyebaran fitnah dapat diminimalisir, dan media dapat menjalankan perannya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab.

### 3. KESIMPULAN

Fitnah dalam pemberitaan media merupakan masalah serius yang dapat merusak reputasi individu, kelompok, atau institusi, serta memicu ketegangan sosial. Faktor utama penyebab terjadinya fitnah dalam media antara lain adalah kurangnya verifikasi informasi, pengaruh kepentingan ekonomi atau politik, ketidakpahaman terhadap etika jurnalistik, serta pengaruh media sosial dan berita hoaks yang tidak terkontrol. Dalam dunia jurnalistik yang serba cepat, tekanan untuk segera memberitakan tanpa pengecekan fakta dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah, yang kemudian berkembang menjadi fitnah.

Untuk menghindari fitnah dalam pemberitaan, prinsip etika media harus diterapkan dengan ketat. Prinsip dasar seperti akurasi, keadilan, dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi oleh setiap jurnalis. Verifikasi informasi, penghindaran judul yang provokatif, serta perlindungan terhadap privasi individu menjadi langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya fitnah. Selain itu, penting bagi media untuk melibatkan teknologi verifikasi fakta, melakukan edukasi dan pelatihan kepada wartawan, serta menjalankan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pemberitaan yang disampaikan adalah akurat dan tidak menyesatkan.

Dengan strategi pencegahan yang tepat, seperti peningkatan literasi media bagi publik, pengawasan yang lebih baik oleh badan pengawas media, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika jurnalistik, kita dapat mengurangi dampak negatif fitnah dalam pemberitaan. Media yang profesional dan bertanggung jawab memiliki peran besar dalam menjaga kredibilitas informasi dan memastikan bahwa publik mendapatkan berita yang benar, berimbang, dan tidak merugikan pihak lain.

Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip etika media dan faktor penyebab terjadinya fitnah dalam pemberitaan, beberapa rekomendasi berikut dapat diusulkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah dalam media:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Etika Jurnalistik. Diperlukan program pelatihan yang berkelanjutan bagi wartawan dan jurnalis mengenai etika jurnalistik dan hukum terkait pemberitaan. Pelatihan ini harus mencakup teknik verifikasi informasi, penghindaran berita hoaks, dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial media dalam menyebarkan informasi yang benar dan berimbang. Edukasi tentang etika jurnalistik harus menjadi bagian integral dari pendidikan di sekolah-sekolah jurnalisme.
2. Penerapan Teknologi Verifikasi Fakta Secara Luas. Media perlu mengintegrasikan teknologi verifikasi fakta untuk memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Penggunaan alat dan platform yang dapat memeriksa keaslian sumber informasi, seperti alat pengecekan fakta (fact-checking tools), dapat mengurangi risiko penyebaran fitnah. Media juga dapat berkolaborasi dengan lembaga fact-checking untuk memperkuat kredibilitas berita yang disajikan.
3. Peningkatan Pengawasan dan Regulasi Media. Peran Dewan Pers dan badan pengawas media lainnya harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua media yang beroperasi mematuhi kode etik jurnalistik. Pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dapat menurunkan tingkat penyebaran fitnah. Pemerintah juga perlu mengembangkan regulasi yang lebih jelas terkait tanggung jawab media dalam menangani berita yang berpotensi merusak reputasi atau menyesatkan publik.
4. Pemberian Ruang untuk Koreksi dan Klarifikasi. Media perlu menyediakan ruang bagi pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas pemberitaan yang dianggap merugikan. Dengan adanya mekanisme koreksi dan klarifikasi yang terbuka, media dapat memperbaiki kesalahan informasi yang telah tersebar dan meminimalisir dampak negatif dari fitnah.
5. Meningkatkan Literasi Media bagi Masyarakat. Literasi media yang tinggi di kalangan masyarakat dapat membantu mereka untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Kampanye edukasi yang mengajarkan cara memverifikasi berita, mengenali hoaks, dan membedakan berita yang

kredibel dari yang tidak dapat sangat bermanfaat. Masyarakat yang lebih teredukasi akan lebih sulit terjebak dalam penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat membantu memperlambat penyebaran fitnah.

6. Kolaborasi Antar Media untuk Menjaga Integritas. Media massa harus membangun jaringan kerja sama dalam hal pertukaran informasi yang valid dan saling mengawasi untuk memastikan kebenaran pemberitaan. Kolaborasi ini dapat memperkuat kualitas pemberitaan dan mengurangi potensi terjadinya fitnah yang merugikan pihak tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Hidayat Surya. "Media Sosial Dan Antitesis Jurnalisme." *Jurnal Spektrum Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 17-29.
- Amaliah, Deby, Siti Zainab, and Favi Aditia Ikhsan. "Analisis Konten Hoaks Dan Tabayyun Dalam Akun Media Sosial Tiktok@ Basyasman00." *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 63-73.
- Aminullah, Muhammad. "Etika Jurnalisme Dan Pembentukan Masyarakat Sadar Informasi." *Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika Dan Bisnis Dalam Jurnalisme* 63 (2021).
- Anam, Faris Khoirul. *Fikih Jurnalistik: Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam*. Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Choliq, Abdul Dahlan. "Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa." *Jurnal Hukum Unissula* 25, no. 1 (2011): 12279.
- Dewanti, Shinta Bela. "Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Kej) Dalam Kegiatan Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Harian Joglosemar)," 2014.
- Hijriani, Hijriani, and Muhammad Nadzirin Anshari Nur. "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 301-14.
- Juditha, Christiany. "Akurasi Berita Dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi Di Portal Berita Detiknews)." *Jurnal Pekommas* 16, no. 3 (2013): 145-54.
- Kafka, Maghrifa Kafka Razaqa, Fadlian Rafa Prawira, Gunawan Santoso, Hana Nurhasanah, Joko Pramono, Siti Barkah, and Hadi Haryanto. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 2 (2022): 132-41.
- Maflucha, Lailatul, S Ikom Qoni'ah Nur Wijayanti, and M Ikom. "Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).
- Mutiarani, Unika Putry, Iztiyaul Nur Karimah, and Yudistira Phrygian Syarafa. "Etika Komunikasi Dalam Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 2 (2024): 204-15.
- Nisa, Khoirun. "Peran Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Di Media Sosial." *Impressive: Journal of Education* 2, no. 1 (2024):

1-11.

Pasrah, Heri Romli. "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dakwah Vol IX, No 2, Juli-Desember 2008*, 2008.

Sitorus, Hema Junaice, and Mellysa Tanoyo. "Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 4, no. 2 (2024): 383-94.

Suryadi, Israwati. "Peran Media Massa Dalam Membentuk Realitas Sosial." *Jurnal Academica Fisip Untad* 3, no. 2 (2011): 634-46.